

DOSEN MUDA



LAPORAN KEGIATAN

**PENGARUH HUBUNGAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT – DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KLATEN**

Oleh :

**HADI SASANA, SE, MSi
ACHMA HENDRA S, SE, MSi**

Dibiayai Oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Nomor : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003 tanggal 28 Maret 2003

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
NOVEMBER, TAHUN 2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daftar: 190/KI/FE/C/.....

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

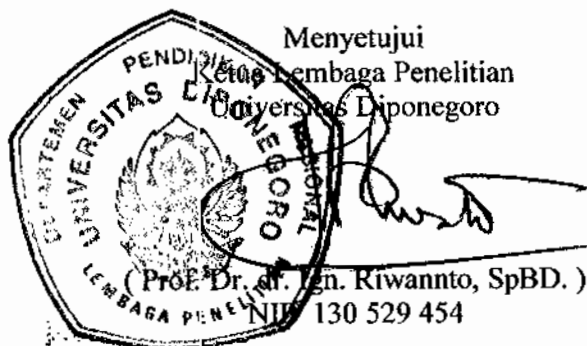
1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat – Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten
- b. Bidang Ilmu : Ekonomi
- c. Kategori Penelitian : Menunjang Pembangunan
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Hadi Sasana, SE, MSi
- b. Jenis Kelamin : Laki – laki
- c. Gol. Pangkat dan NIP : IIIa / 132 163 887
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
- g. Pusat Penelitian : Universitas Diponegoro
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Klaten
5. Anggota Peneliti : 1 (satu) orang
6. Lama Penelitian : 8 (delapan) bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp 5.000.000
- Sumber biaya : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Semarang, November 2003



Ketua Peneliti

(Hadi Sasana, SE, MSi.)
NIP 132 163 887



SUMMARY

INFLUENCE OF THE FISCAL RELATIONSHIP BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE LOCAL GOVERNMENT ON THE ECONOMIC GROWTH IN KLATEN REGENCY.

Hadi Sasana, Achma Hendra S *)

This research attempts to identify the influence of the fiscal relationship between the central government and the local government on the economic growth (the real Gross Regional Domestic Product) in Klaten Regency. The variabel fiscal consist of the Regional Original Income (here after called PAD), Property Tax (here after called PBB), the aids from the central government and provincial government, and labour.

The data used in this research are time series data for the period 1979 until to 2001 obtained from the Regencial Statistic Office of Klaten, the Regencial Financial Bureau of Klaten, the Distric Revenues Agency of Klaten. The analysis method applied in this research are double regresion with diagnosis test (t-test and F-test),econometrics anlysis with classical assumption test (Normality,Heteroskedasticity, Linierity, Multikolinearity, Autocorelation), and economic analysis.

The result of this research indicate that the variables of the Regional Original Income (PAD), and variables aids from the central government and provincial government did not influence on the economic growth (the real Gross Regional Domestic Product) in the Regency of Klaten. Variables Property Tax (PBB) and labour had positive and significant influence on the economic growth (the real Gross Regional Domestic Product) in the Regency of Klaten. The fiscal relationship between the central government and the local government, showed Klaten Regency had dependency of aids from the central government.

*) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

*) Dibiayai Oleh Proyek Penelitian Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, Depdiknas sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Nomor : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003 Tanggal 28 Maret 2003

RINGKASAN

PENGARUH HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT – DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KLATEN Hadi Sasana, Achma Hendra S *)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan fiskal pemerintah pusat-daerah terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Klaten. Variabel fiskal meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sumbangan dan bantuan, dan tenaga kerja.

Data yang digunakan adalah data runtun waktu (*time series*) dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2001 yang diperoleh dari Kantor Statistik Kabupaten Klaten, bagian keuangan Kabupaten Klaten dan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Klaten. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan diagnosis test (uji t dan uji F). Analisis ekonometrika berupa uji asumsi klasik (Normalitas, Heteroskedastisitas, Linieritas, Multikolinearitas, Autokorelasi), serta analisa ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Klaten. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan variabel sumbangan dan bantuan, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Klaten. Hubungan fiskal pemerintah pusat-daerah Kabupaten Klaten menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

*) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

*) Dibiayai Oleh Proyek Penelitian Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, Depdiknas sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Nomor : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003 Tanggal 28 Maret 2003

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten “ dapat terselesaikan.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini mulai dari tahap persiapan hingga penulisan laporan.

Harapan kami, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Klaten khususnya.

Akhirnya, meskipun segenap daya dan kemampuan sudah dicurahkan dalam penulisan ini, kami sadar bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Semarang, November 2003

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Summary.....	iii
Ringkasan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
BAB IV METODE PENELITIAN	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	14
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Realisasi dan Distribusi Persentase Penerimaan Daerah Tingkat II di Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 1995/1996-1998/1999 (Milyar Rp)	2
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Berdasarkan Harga Konstan 1993 tahun 1993-1998	15
Tabel 4.2	Struktur Ekonomi Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1997-1999	16
Tabel 4.3	Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1996/1997 – 2000/2001 (Ribu Rp).....	17
Tabel 4.4	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1996/1997 – 2000/2001 (Ribu Rp).....	17
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan Laba Usaha Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1999/2000 – 2000/2001 (Ribu Rp).....	18
Tabel 4.6	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1996/1997 – 2000/2001 (Ribu Rp)	19
Tabel 4.7	Penerimaan Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 1995/1996 – 2000/2001 (Ribu Rp)	19
Tabel 4.8	Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Klaten Tahun 1993-1999	20
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Regresi Model Empiris	21
Tabel 4.10	Derajat Otonomi Fiskal (PAD/APBD) dan Proporsi Sumbangan dan Bantuan Terhadap APBD Kabupaten Klaten Tahun 1979/1980 - 2001	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Peran pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan melalui tindakan-tindakan dalam masyarakat memegang peranan yang sangat penting sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Pada pemerintahan Orde Baru, dalam rangka pengembangan kemampuan pemerintah daerah adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi semua kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan pemerintahan di Indonesia pada era pemerintahan Orde Baru. Undang-undang ini menetapkan dengan jelas bahwa esensi dari otonomi daerah lebih merupakan suatu kewajiban dari pada suatu hak, khususnya tugas daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemakmuran rakyat.

Gagasan merealisasikan ide otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1974 dan telah tertuang dalam PP No. 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah belum dapat terealisasi. Berbagai permasalahan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan otonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh hubungan keuangan pusat-daerah yang dianggap oleh daerah tidak realistis dan tidak adil, karena dalam kenyataannya masih didominasi oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebabkan antara lain karena terbatasnya sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, dari segi kuantitas cukup banyak tetapi dari sisi potensial hanya beberapa jenis pajak daerah saja yang memiliki potensi. Selain itu daerah juga tidak mempunyai kewenangan yang memadai untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri.

Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah harus dapat memberikan kejelasan mengenai seberapa besar kewenangan yang dimiliki daerah. Kewenangan daerah meliputi antara lain penggalan sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatannya, kebebasan pengadaan pengutan-pungutan, penetapan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksi, dan kebebasan (*discretion*) pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluaran daerah. Kondisi seperti ini akan meningkatkan kreatifitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber potensial dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi di dalam penggunaannya (Tim Peneliti Ekonomi Cides, 1998 : 12).

Selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Ketergantungan pemerintah Daerah terhadap sumbangan dan bantuan di dalam membiayai pemerintahan dan pembangunannya dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi dan Distribusi Persentase Penerimaan Daerah Tingkat II
di Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 1995/1996 – 1998/1999 (Milyar Rp)

Penerimaan	1995/ 1996	1996/ 1997	1997/ 1998	1998/ 1999
Pendapatan Asli Daerah	1.528,24 (13,67)	1.800,86 (13,87)	2.056,13 (13,25)	2.380,93 (11,42)
Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak	1.707,97 (15,26)	2.115,22 (16,30)	2.358,51 (15,19)	2.736,79 (13,12)
Sumbangan dan Bantuan	7.467,24 (66,76)	8.514,07 (65,59)	10.508,56 (67,70)	14.990,8 (71,88)
Pembangunan	120,53 (1,08)	149,51 (1,15)	138,25 (0,89)	210,50 (1,01)

Sumber : Statistik Keuangan Pemda Tingkat II Se Indonesia, 1999

Proporsi penerimaan pendapatan asli daerah Dati II di Indonesia selama empat tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 1993/1994 besarnya penerimaan pendapatan asli daerah adalah Rp 1.528,24 milyar (13,67 %), sementara pada tahun 1998/1999 menjadi Rp 2.380,93 milyar (11,42 %). Adapun proporsi

penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak juga mengalami penurunan, pada tahun 1993/1994 penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 1.707,97 milyar (15,26 %) sedangkan pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 2.736,79 milyar (13,12 %). Sebaliknya penerimaan dari sumbangan dan bantuan dari pusat serta Dati I justru mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 7.467,24 milyar (66,76 %) dan meningkat menjadi sebesar Rp 14.990,80 milyar (71,88 %).

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka proporsi penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah ternyata jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Misalnya untuk Inggris (1983) 55 %, Thailand (1981) 54 %, Malaysia (1981) 82 %, Perancis (1985) 57 %, dan Amerika Serikat (1983) 78 % (*IMF Government Financial Statistic, 1985*). Untuk Indonesia besarnya proporsi penerimaan PAD Dati I hanya sebesar 36,17 % sementara Daerah Tingkat II sebesar 14 % (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000, RI).

Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat – daerah selama ini ditandai dengan kontrol pusat terhadap proses pembangunan di daerah. Hubungan ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang didrop dari pusat. Dengan rendahnya PAD, maka daerah dihadapkan pada hal-hal yang serba dilematis, karena disatu pihak untuk meningkatkan penerimaan daerah, sedangkan untuk memacu produktivitas dan kegiatan bisnis pemerintah daerah memerlukan pengeluaran untuk membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi. Investasi merupakan motor penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

1.2. Perumusan Masalah

Salah satu hal yang menonjol selama pemerintahan Orde Baru adalah terjadinya hubungan yang sangat asimetris antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang keuangan publik. Pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat dan ketergantungan tersebut meliputi sisi penerimaan maupun pengeluaran. Sehingga yang menjadi kendala adalah masih rendahnya PAD yang dimiliki Daerah Tingkat II termasuk di Kabupaten Klaten.

Rendahnya pendapatan asli daerah menyebabkan penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB riil) lebih banyak bersumber dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Manajemen pembangunan daerah yang selama ini berjalan menunjukkan kecenderungan yang kurang serasi. Pembangunan di bidang ekonomi seperti yang tercermin dalam produk domestik regional bruto memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan tersebut juga semakin besar. Dengan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat adalah *bagaimana pengaruh hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.*